

Minoritas dalam Masyarakat Plural dan Multikultural Perspektif Islam

Masyhuri

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: masyhuri@uin-suska.ac.id

Ali Akbar & Saidul Amin

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: aliakbarusman@yahoo.com

Abstract: Minority groups in Indonesia often lose their rights as citizens not only because of the treatment of the majority, but also by the state. The rights of minorities that often cannot be fulfilled in this country are the right to freedom of religion and belief and freedom to practice worship in accordance with these religions and beliefs. In the context of Islamic education, an effort to understand the reality of differences in religion, Islamic education institutions are expected to be able to instill awareness of other religious communities by collaborating with each other and building dialogue through multi-cultural education. The awareness of multiculturalism is not just an understanding of difference, but also must be shown with a concrete attitude that even though there are different beliefs, they are equally human beings who must be treated humanely. A dialogical approach that leads to a culture of mutual tolerance, getting rid of hatred and enmity, the ability to listen to one another, being accommodating, and exchanging information to achieve mutual understanding. The approach offered by Waleed el-Ansary and Mashood Baderin is sufficient to provide a solution to inter-religious conflicts caused by shallowness and gaps in understanding in understanding the teachings of each religion.

Keywords: Minority, Plural, Multicultural

Abstrak: Kelompok minoritas di Indonesia sering kali kehilangan hak-haknya sebagai warga negara bukan diakibatkan oleh perlakuan mayoritas semata, melainkan juga kerap dilakukan oleh negara. Hak kaum minoritas yang acap kali tidak bisa dipenuhi di negeri ini adalah hak untuk bebas beragama dan berkeyakinan serta kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan tersebut. Dalam konteks pendidikan Islam upaya untuk memahami realitas perbedaan dalam beragama, lembaga-lembaga pendidikan Islam diharapkan bisa menanamkan kepedulian komunitas agama lain dengan saling bekerjasama dan membangun dialog melalui pendidikan multi kultural. Kesadaran multikulturalisme bukan sekadar memahami keberbedaan, namun juga harus ditunjukkan dengan sikap konkrit bahwa sekalipun berbeda keyakinan, namun sama-sama sebagai manusia yang mesti diperlakukan secara manusiawi. Pendekatan dialogis yang mengarah pada budaya saling toleransi, membuang kebencian dan permusuhan, kemampuan untuk saling mendengar, sikap akomodatif, dan saling tukar informasi untuk mencapai kesepahaman bersama. Pendekatan yang ditawarkan oleh Waleed el-Ansary dan Mashood Baderin cukup memberikan solusi bagi konflik antar umat beragama yang diakibatkan oleh kedangkalan dan kesenjangan pemahaman dalam memahami ajaran agama masing-masing.

Kata Kunci: Minoritas, Plural, Multikultural

PENDAHULUAN

Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak hanya hidup di ruang hampa dari berbagai interaksi sosial, menuntut adanya interaksi yang intensif dengan manusia yang lainnya. Adanya interaksi tersebut tentunya, disadari atau tidak disadari, akan menghadirkan benturan-benturan kepentingan ataupun sekedar penguatan identitas suatu komunitas atas komunitas yang lainnya. Implikasinya, kelompok yang berhasil dalam proses penguatan identitas tersebut karena adanya dukungan sosial, baik dengan pertimbangan kuantitas ataupun kualitas, cenderung akan memproklamirkan diri sebagai kelompok mayoritas yang disadari atau tidak disadari akan memunculkan pula kelompok minoritas sebagai kelompok yang umumnya dianggap sebagai komunitas sosial kelas dua yang berada di bawah pengaruh kelompok mayoritas dalam berbagai dimensi kehidupan sosial meski biasanya

mengabaikan aspek-aspek produktivitas kelompok minoritas.

Bangsa Indonesia sebagai negara Bhineka Tunggal Ika yang terdiri dari berbagai kelompok etnis, budaya, agama, strata sosial dan lain-lainnya, tentunya sangat mendambakan keserasian dalam perbedaan-perbedaan baik dalam hal agama, budaya, politik, keamanan, strata sosial maupun pendidikan dalam upaya menciptakan negara dan bangsa yang berkeadilan sosial sebagai cerminan dari dasar negara Pancasila.

Ali Maksum menggambarkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang masyarakatnya sangat majemuk atau pluralis. Kemajemukan bangsa Indonesia dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu horizontal dan vertikal. Dalam perspektif horizontal, kemajemukan bangsa kita dapat dilihat dari perbedaan agama, etnis, bahasa daerah, geografis, pakaian, makanan dan budayanya. Sedangkan dalam perspektif vertikal, kemajemukan

bangsa kita dapat dilihat dari perbedaan tingkat pendidikan, ekonomi, pemukiman, pekerjaan, dan tingkat sosial budaya.¹

Mengutip Usman Pelly, etnisitas merupakan sumber kekayaan hakiki yang dimiliki insan Indonesia guna saling mengenal dan memperkaya budaya. Bagi mereka, persamaan adalah anugerah dan perbedaan adalah berkah.² Namun, disamping menjadi kebanggaan, keragaman bangsa Indonesia juga menjadi tantangan sekaligus ancaman belum semua warganya bisa menerima gagasan tentang sebuah tatanan multikultural. Munculnya keterbukaan politik saat ini, setelah selama lebih dari tiga dekade hidup dalam otoritarianisme, justru menjadi salah satu pintu masuk bagi berlangsungnya bermacam-macam proses penguatan politik identitas di banyak tempat.

¹ Ali Maksum dan Luluk Yunan Ruhendi, *Paradigma Pendidikan Universal* (Yogyakarta: IRCICOD, 2004), 190.

² Usman Pelly, *Kualitas Bermasyarakat: Sebuah Studi Peranan Etnis dan Pendidikan dalam Keresasian Sosial* (Medan: Proyek Kerjasama Kantor Meneg KLH-IKIP Medan, 1988), 13.

Lebih dari sekedar bentuk-bentuk euforia politik setelah lepas dari otoritarianisme, kecenderungan politisasi identitas etnik dan agama yang sekarang terjadi di beberapa daerah sampai pada level ketika kebersamaan sebagai sebuah bangsa mulai dipertaruhkan. Beberapa tendensi formalisasi agama melalui kebijakan publik dalam label peraturan daerah, misalnya, mengundang resiko dilanggarnya *the lowest common denominator* yang sudah disepakati bersama sejak Indonesia meraih kemerdekaan dari kolonialisme tahun 1945 yang lalu, yakni fundamen bahwa Indonesia bukanlah negara yang didasarkan pada satu agama tertentu.³

Adanya kesenjangan jarak antara kelompok mayoritas dan minoritas ini tentunya akan menjadi suatu sandungan tersendiri demi terciptanya kestabilan pembangunan nasional dalam kehidupan berbangsa, bernegara, beragama, dan

³ Usman Pelly, *Kualitas Bermasyarakat: Sebuah Studi Peranan Etnis dan Pendidikan dalam Keresasian Sosial...*, 14.

berkeyakinan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Fenomena Mayoritas dan Minoritas Dalam Masyarakat Plural dan Multikultural

Dalam kehidupan bermasyarakat yang plural hampir ada mayoritas dan minoritas, baik di bidang agama, ekonomi, moral, dan politik, dimana minoritas lebih mudah ditindas dan lebih sering mengalami penderitaan karena tekanan oleh pihak mayoritas. Hubungan antara kaum mayoritas-minoritas sering menimbulkan konflik social yang ditandai oleh sikap subyektif berupa prasangka dan tingkah laku yang tidak bersahabat. Mengenai minoritas dan mayoritas, kelompok mayoritas atau kelompok dominan dalam suatu masyarakat merupakan kelompok yang merasa memiliki kontrol atau kekuasaan untuk mengontrol. Mereka merupakan sumber daya kekuasaan dalam setting institusi yang berbeda-beda. Setting

institusional itu cenderung lebih penting karena hal tersebut mempengaruhi masyarakat, termasuk penyelenggaraan pemerintahan, agama, pendidikan dan pekerjaan (ekonomi). Sebaliknya, kelompok minoritas kurang mempunyai akses terhadap sumber daya, privilese kurang atau bahkan tidak berpeluang mendapat kekuasaan seperti mayoritas. Inilah ketidakseimbangan kekuasaan, dan hal ini yang dapat mendorong prasangka antara mayoritas dan minoritas.⁴

Kelompok minoritas pada umumnya diartikan sebagai sekelompok orang yang berjumlah lebih sedikit dibandingkan dengan kelompok mayoritas di wilayah tertentu, yang membedakan kedua kelompok ini adalah identitas, asal-usul, kebudayaan, bahasa dan lain-lain. Menurut definisi yang ditawarkan pada tahun 1977 oleh Francesco

⁴ Alo Lilirweri, *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur* (Yogyakarta: LKiS, 2005), 10.

Capotorti, *Special Rapporteur of the United Nations Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities*, minoritas adalah:

*A group numerically inferior to the rest of the population of a State, in a non-dominant position, whose members – being nationals of the State – possess ethnic, religious or linguistic characteristics differing from those of the rest of the population and show, if only implicitly, a sense of solidarity, directed towards preserving their culture, traditions, religion or language.*⁵

Griffiths (2006) menyatakan bahwa mayoritas dan minoritas dapat berdampak negative bagi masyarakat baik bagi kaum minoritas maupun pada kaum mayoritas itu sendiri. Hal ini disebabkan adanya perilaku diskriminatif yang muncul karena menganggap kelompok lain sebagai *out-group* yang merupakan lawan bagi mereka terutama bagi kaum minoritas yang dianggap asing oleh kaum mayoritas. Adanya

⁵ Office of the High Commissioner for Human Rights, *Minority Rights: International Standards and Guidance for Implementation*, New York, 2010, 2.

perilaku diskriminatif ini menimbulkan konflik social dimana salah satu pihak kelompok merasa dirugikan dan ditindas.⁶

Gambaran umum tentang pergulatan kelompok mayoritas dan minoritas bisa memberikan isyarat bahwa ada suatu potensi disharmonisasi hubungan di antara keduanya. Isyarat tersebut semakin jelas manakala dibawa pada tataran panggung kehidupan yang empiris praktis dengan segala pertarungan kepentingan didalamnya. Tentu saja, kelompok mayoritas dengan bebasnya melakukan hegemoni terhadap kelompok minoritas meski dengan malu-malu kucing mereka mencari-cari justifikasi atas tindakan hegemoni tersebut sambil berteriak lantang atas nama agama.

Dalam konteks Islam mengkaji relasi mayoritas (Islam) dengan kelompok minoritas merupakan

⁶ Griffiths, J.A., *Children's Understanding of, and Attitudes Toward, Ethnic In-Groups and Out-Groups*, (Australia: Griffith University, 2006), 74.

tema yang menarik di Indonesia. Menjadi isu yang menarik dikarenakan, Pertama, bangsa Indonesia merupakan bangsa dengan mayoritas penduduk beragama Islam terbesar di dunia yang dinilai sukses mengembangkan demokrasi. Perkembangan demokrasi di Indonesia bahkan melampaui demokrasi di negara-negara Asia Selatan. Namun di sisi lain, tindakan diskriminatif terhadap kelompok minoritas oleh negara dan kelompok mayoritas masih saja berlangsung di negeri ini.⁷

Kedua, sebagai kelompok mayoritas, umat Islam masih merasa menjadi minoritas dalam akses politik maupun ekonomi di republik ini. Bagi sebagian kelompok, kondisi perpolitikan di Indonesia masih belum sepenuhnya merepresentasikan kepentingan umat Islam. Sebagian kelompok

dalam Islam menggunakan logika bahwa mayoritas –karena perannya yang “lebih” terhadap bangsa ini, seharusnya juga diperlakukan secara “lebih”. Oleh karena itu, sistem politik yang sesuai menurut kelompok ini adalah politik afirmasi dan representasi. Penguatan dan perwakilan dari umat Islam untuk sebanyak mungkin mengisi posisi-posisi strategis di negeri ini baik pada arena politik maupun ekonomi.

Ketiga, gejala semakin menguatnya kembali politik identitas yang acap meminggirkan kelompok minoritas. Demokrasi kerap dimaknai sebagai mayoritarianisme. Otoritas mayoritas sebagai pengelola dan penentu kebijakan merupakan kecenderungan umum di sejumlah daerah di Indonesia. Lewat pintu demokrasi, berkembang tuntutan, aspirasi dan warna kebijakan politik yang ditentukan dan dikendalikan oleh mayoritas (*majority rule*). Karena ditentukan oleh logika mayoritas, akibatnya di sejumlah

⁷ Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naispospos (eds.), *Negara Menyangkal Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2010*, (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2011). 28.

daerah banyak muncul kebijakan yang kurang berpihak bahkan meminggirkan keberadaan kelompok minoritas.

Kelompok minoritas di Indonesia sering kali kehilangan hak-haknya sebagai warga negara bukan diakibatkan oleh perlakuan mayoritas semata, melainkan juga kerap dilakukan oleh negara. Hak kaum minoritas yang acap kali tidak bisa dipenuhi di negeri ini adalah hak untuk bebas beragama dan berkeyakinan serta kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan tersebut. Hilangnya hak dasar ini diantaranya akibat adanya regulasi negara yang mengatur dan menentukan "agama resmi" dan "tak resmi", "diakui" dan "tak diakui". Konsep pemilahan atau dikhotomi yang biasanya diputuskan berdasar standar-standar dan tafsir mayoritas.

Untuk menghapus praktik-praktik diskriminatif seperti ini diperlukan dua jalur upaya sekaligus perjuangan politik kesetaraan dan

penguatan kapasitas kelompok mayoritas atas nilai-nilai demokrasi. Upaya pertama merupakan advokasi atas sejumlah kebijakan negara yang masih dirasa belum adil. Beberapa produk undang-undang yang kurang selaras dengan semangat UUD 1945 dan perkembangan dunia modern sudah selayahnya ditinjau kembali. Sedangkan upaya kedua dimaksudkan untuk memperkuat kesadaran umat mayoritas untuk lebih mengembangkan nilai-nilai kesetaraan, kebebasan, humanistik, cinta tanah air dan toleransi terhadap keragaman. Apabila hal-hal mulia ini berhasil dikembangkan dan diimplementasikan oleh seluruh umat mayoritas, maka akan bermanfaat tidak hanya bagi konsolidasi demokrasi di negeri ini, tetapi juga akan semakin meneguhkan citra Islam sebagai agama yang *Rahmatan lil Alammin*

B. Peranan Psikologi Lintas Agama dan Budaya dalam Membangun Pluralisme

Psikologi lintas agama dan budaya merupakan kajian ilmiah tentang perilaku manusia dan transmisinya, yang dibentuk dan dipengaruhi oleh daya kekuatan sosial, agama, dan budaya. Batasan ini mengarah pada dua gambaran sentral yaitu ragam perilaku manusia, dan kaitan perilaku seseorang dengan konteks keagamaan dan budaya. Dalam pengertian yang lebih luas, psikologi lintas agama dan budaya adalah tentang pemahaman kebenaran dan prinsip-prinsip psikologis, dengan melihat apakah hal tersebut bersifat universal (benar bagi semua orang dari semua agama dan semua budaya) ataukah kekhasan dari masing-masing agama dan budaya (benar bagi sebagian orang dari agama dan budaya tertentu).

Bahkan tidak hanya sampai di situ saja, dalam psikologi lintas agama dan budaya ini juga meng-*cross*-kan agama satu dengan agama-agama yang lain, budaya satu dengan budaya-budaya yang lain, dan budaya satu dengan agama-agama,

bahkan agama dengan budaya-budaya. Sehingga cabang psikologi ini bisa berawal dari banyak arah dan menuju segala arah, melintas batas agama dan budaya secara bersamaan dan bersilangan. Kajian-kajian tentang Psikologi lintas agama dan budaya ini pada focus pada perubahan-perubahan perilaku yang merupakan akibat dari kontak antara agama-agama dan budaya-budaya, bahkan agama yang budaya dan budaya yang agama.⁸

Memasukkan disiplin psikologi ke dalam ranah agama dan budaya juga merupakan sebuah keniscayaan. Realita posisi manusia akan dihadapkan kepada peran dan fungsi manusia itu sendiri, dimana manusia mempunyai peran dan fungsi sebagai manusia beragama (terkecuali seorang atheis) dan berbudaya. Hubungan manusia dan agama merupakan kenyataan historis sekaligus merupakan kebutuhan manusia dengan pergumulan agama. Terutama agama Islam, bagaimana

⁸ Alef Theria Wasim, *Kumpulan Materi Kuliah Psikologi Lintas Agama dan Budaya 2013-2014*

seorang Muslim dapat dikatakan kamil jika dalam berkehidupan selalu mempertautkan dimensi agama dalam setiap perilakunya.

Pendidikan memiliki peran strategis untuk membangun serta mengembalikan cara berpikir dan sikap peserta didik ke dalam tataran yang mengerti kemajemukan bermasyarakat dalam beragama dan berbudaya. Dalam konteks implementasi, pendidikan yang diselenggarakan haruslah pendidikan yang empati dan simpati terhadap problem kemanusiaan seperti penindasan, kemiskinan, pembantaian, dan sebagainya. Pendidikan agama yang berlangsung bukan sekadar penanaman wacana melalui proses indoktrinasi otak, tetapi melatih terampil beragama dan kesiapan menghadapi masalah konkret dalam masyarakat berupa perbedaan.

Dalam konteks pendidikan islam upaya untuk memahami realitas perbedaan dalam beragama, lembaga-lembaga pendidikan Islam diharapkan bisa menanamkan

kepedulian komunitas agama lain dengan saling bekerjasama dan membangun dialog melalui pendidikan multi kultural. Kesadaran multikulturalisme bukan sekadar memahami keberbedaan, namun juga harus ditunjukkan dengan sikap konkrit bahwa sekalipun berbeda keyakinan, namun sama-sama sebagai manusia yang mesti diperlakukan secara manusiawi. Hal ini seperti melatih peserta didik untuk bisa berbagi dengan orang terdekatnya.

Islam turun ke dunia mengandung misi kemanusiaan dan kedamaian yang merupakan kebutuhan dari semua umat yang hidup di permukaan bumi. Islam secara tegas dan jelas menyatakan bahwa Islam diturunkan untuk semesta alam. Artinya Islam lahir bukan semata-mata untuk umat Islam saja, tetapi semangat universalitas Islam sudah ditampakkan. Hal ini dapat kita lihat dari firman Allah tentang tujuan keterutusan Rosulullah, yang artinya tujuan diturunkannya Islam, yang

kemudian kita kenal dengan tujuan risalah. Dalam Surat al Anbiya' ayat 107, Allah SWT berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ - ١٠٧

Artinya:

"Dan tiadalah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam".

Hal ini menegaskan betapa Islam diperuntukkan untuk semua manusia, bahkan semua alam dengan keragaman, perbedaan dan pluralitas yang mengitarinya. Pada dasarnya, Islam memandang multikulturalisme sebagai sebuah sunnatullah, keniscayaan alam yang tak terbantahkan.

Abdul Aziz Sachedina menyatakan bahwa Islam multikultural adalah sebetulnya perspektif teologis tentang penghargaan terhadap keragaman dan "sangat lain" (the other); suatu assessment teologis mengenai agama lain, kultur lain, dan etnik lain, dan penempatannya secara layak dalam

wilayah tatanan publik etis.⁹ Meminjam istilah Abdul Aziz Sachedina, ini merupakan "sensibilitas ekumene" (*ecumenical sensibility*) dari teologi multikulturalis yang menggambarkan perhatian dan kepedulian terhadap penduduk dunia, mempengaruhi kehidupan mereka melampaui batas-batas komunitas-komunitas keagamaan dan kultural. Dan tujuan luhur teologi multikulturalis (*summum bonum*) adalah pembebasan dari belenggu kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, kezaliman, dan ketidakadilan sebagai akibat dari relasi kolonial atas-bawah, dominasi-subordinasi, superior-inferior, menindas-tertindas baik dalam hubungan antaragama, antaretnik dan antarbudaya.

Sebagai risalah *profetik*¹⁰, Islam pada intinya adalah seruan pada

⁹ Abdulaziz Sachedina, *The Islamic Roots of Democratic Pluralism* (Oxford, New York: Oxford University Press, 2001), 7.

¹⁰ Istilah "profetik" sebagai suatu kesadaran pernah dipopulerkan oleh Muhammad Iqbal, seorang filosof-penyair asal Pakistan, yakni kesadaran profetik yang menggaribawahi pentingnya seorang Muslim

semua umat manusia, termasuk mereka para pengikut agama-agama, menuju satu cita-cita bersama kesatuan kemanusiaan (*unity of humankind*) tanpa membedakan ras, warna kulit, etnik, kebudayaan dan agama. 11 Karena umat manusia tak ubahnya waktu, keduanya maju tak tertahankan. Dan sama seperti tak ada jam tertentu yang mendapat kedudukan khusus, begitu pula tak ada satu pun orang, kelompok, atau bangsa manapun yang dapat membanggakan diri sebagai diistimewakan Tuhan (*the chosen people*). Ini dapat berarti bahwa dominasi ras dan diskriminasi atas nama apapun merupakan kekuatan antitesis terhadap tauhid, dan karenanya harus dikecam sebagai kemusyrikan dan sekaligus kejahatan atas kemanusiaan. Pesan

untuk tidak larut dalam pengalaman keagamaan yang sifatnya personal dan hilang dalam kefanaan, namun pengalaman mistik perjumpaan dengan Tuhan itu diteruskan ke bumi untuk melakukan perubahan sosial, budaya, politik, ekonomi dan intelektual umat manusia. Lihat Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam* (New Delhi: Kitab Bhavan, 1985)

kesatuan ini secara tegas disinyalir dalam QS. Ali Imran [3] : 64 berikut;

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا
وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا
يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ۗ فَإِنْ تَوَلَّوْا
فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ - ٦٤

Artinya:

Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah". jika mereka berpaling Maka Katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa Kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)".

Misi Nabi membawa ajaran Islam yang *rahmatan lil'alamin*, mempunyai konsep untuk menyeragamkan nota kesepahaman yang akan membangun sebuah tatanan sikap dan emosi yang setara dalam menyikapi pluralitas sikap, mental, dan emosi masyarakat Arab pada waktu itu. Oleh karena itu, penulis percaya piagam Madinah yang dibuat Nabi

merupakan kitab psikologi lintas agama dan budaya. Mungkin, secara eksplisit Nabi tidak pernah mengatakan hal ini, tapi setidaknya factor kesejarahan ini dapat mengilhami disiplin psikologi lintas agama dan budaya secara implicit.

Seperti dipaparkan oleh prof. Dr. KH. Said Aqiel Siradj, MA, mengatakan bahwa :

"Bangunan nation Madinah itu menurut beberapa dokumen otentik di bawah payung *the constitution of madina*" atau shahifah/watsiqah Madinah, yang dalam bahasa Indonesia diartikan Piagam Madinah (Madinah Charter). Dalam konstitusi (piagam) yang ditandatangani oleh seluruh komponen di Madinah: Nasrani, Yahudi, Muslim (Anshor-Muhajirin) dan Musyrikin itu, ternyata tidak sama sekali mencantumkan kata Al-Qur'an, Hadits, dan Islam. Dalam 47 pasal yang termuat di dalamnya statemen yang diangkat meliputi masalah monotheisme, persatuan, kesatuan, persamaan hak, keadilan, kebebasan beragama, bela

Negara, pelestarian adat, perdamaian dan proteksi.¹²

Dari bukti historis ini menunjukkan bahwa psikologi lintas agama dan budaya telah jauh-jauh hari dilaksanakan oleh Nabi. Dengan tujuan meredakan segala emosi dan arogansi keberingasan dan menjauhkan segala bentuk diskriminasi dan ketidakadilan atas nama agama dan budaya. Bukankah ini masuk dalam ruang lingkup psikologi lintas agama dan budaya ? hanya saja tidak secara eksplisit mengarah pada disiplin psikologi lintas agama dan budaya, serta ada kemungkinan konsepnya tidak sistematis sekarang, disamping karena dinamika kesejarahan hidup juga karena perkembangan zaman yang terus maju (modernisasi). Islam sendiri sebagai agama yang menyatakan dirinya sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam mempertegas di dalam al-Qur'an bahwa Islam sangat mengancam segala bentuk anarkhis kerusakan

¹² Said Aqiel Siradj, *Islam Kebangsaan: Fiqih Demokratik Kaum Santri* (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999), 210.

dan diskriminasi mayoritas dan minoritas.

C. Fenomena Kekerasan dan Praktek Kehidupan Beragama di Indonesia

Dalam beberapa tahun terakhir, negeri ini menghadapi situasi sosial yang mencemaskan sekaligus dapat mengganggu sistem demokrasi. Kekerasan atas nama agama dan Konflik antar kelompok kerap terjadi. Dalam catatan sosiolog Universitas Indonesia, Imam B. Prasodjo kekerasan atas nama agama merupakan satu dari banyak persoalan yang dihadapi oleh negara kita. Masalah keamanan, sosial, ekonomi, politik dan moral saling terkait satu sama lain, sehingga sulit untuk mengurai dan mengatasi beragam masalah tersebut. Akibat dari situasi ini, pemerintah seperti tidak memiliki cukup kemampuan untuk memberikan perlindungan kepada warganya, sedangkan masyarakat sendiri telah kehilangan kekuatan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Dalam terminologi ilmu sosial, bila

berbagai persoalan yang dihadapi tidak segera diatasi, maka suatu negara akan memasuki situasi yang disebut dengan "darurat kompleks" (*complex emergency*). Dan tidak berlebihan bila dikatakan bahwa Indonesia telah memasuki situasi "darurat kompleks" ini, karena persoalan-persoalan yang dihadapi sudah sedemikian perlu mendapat penanganan yang sungguh-sungguh.¹³

Konflik antar kelompok yang menjadikan perbedaan latar belakang budaya sebagai "alat pemantik" sudah lama berlangsung dan beberapa diantara konflik itu dilakukan lewat penyerangan fisik yang sudah mengarah pada tataran prasangka yang paling tinggi, yaitu eksterminasi (*extermination*). Secara konseptual, tindakan eksterminasi diekspresikan dalam wujud pemusnahan terhadap kelompok etnis tertentu (*genocide atau ethnic cleansing*). Tentu masih segar dalam ingatan kita "Peristiwa

¹³ Imam B. Prasodjo. "Inikah Negeri Darurat Kompleks?", dalam *Jurnal Aksi Sosial*, Tahun I Edisi Oktober-Desember 2004, 8.

Sanggau Ledo, Sambas dan Sampit” (konflik antara etnis Dayak/Melayu dengan Madura), “Peristiwa Ambon dan Poso” (konflik antaragama) . Dan baru-baru ini terjadi konflik di Kabupaten Tolikara, Papua yang berujung pada pembakaran sejumlah mesjid dan musholla (September 2015), konflik di Bitung Sulawesi Utara dimana para pemuda gerombolan laskar Kristen di Bitung Sulawesi Utara menyerang umat Islam dan melarang pembangunan masjid (Juli 2016), dan yang terbaru konflik penghadangan sejumlah ormas islam melarang kegiatan KKR di gedung sabuga ITB Bandung (Desember 2016).

Agama sebagai pembawa kedamaian sudah semestinya dapat hidup berdamai dengan agama-agama yang berbeda. Oleh karena itu, sebagai orang yang beragama, tidaklah pantas berbicara tentang kedamaian tanpa berusaha untuk hidup damai dengan pemeluk agama lain. Usaha untuk membangun jembatan

komunikasi antar agama harusnya tak mengenal putus asa, walau beribu tantangan berat melintang didepannya. Oleh karena itu, untuk memberikan jalan tengah perlu komitmen semua elemen masyarakat untuk mewujudkan kerukunan hidup umat beragama, yaitu berupa kajian- kajian yang sangat mendalam dan membutuhkan kesabaran tentunya. Pengkajian kerukunan hidup umat beragama paling tidak dapat dilakukan pada dua level kajian, yaitu pengkajian pada level doktrin (ajaran) agama dan pada level sosiologis-historis atau empirik realitas kehidupan beragama secara nyata.

Psikologi Lintas agama dan budaya lahir tidak lain untuk bisa mengakomodir segala bentuk gejala yang bersifat destruktif. Dalam konteks Indonesia, Negara yang mempunyai kuantitas penduduk muslim tidak kurang dari 220 juta jiwa, yang kerap dicap sebagai Negara demokrasi dengan cara pandang yang moderat. Apalagi

dapat hidup berdampingan dengan kalangan yang plural, baik dari segi agama, ras, suku, adat istiadat, bahasa, dan lain-lain.

Oleh karena itu, kalau gejala destruktif ini tidak disikapi dengan serius, maka lambat laun bangsa kita akan mengalami disintegrasi bangsa hanya karena sebab sepele. Dalam pada itu pula psikologi lintas agama dan budaya sangat dibutuhkan untuk upaya mengatasi problem-problem sosial psikologi ini.

a. Persoalan yang Bersifat Pemahaman (*understanding*)

Perkembangan pemahaman, praktik dan perilaku keberagamaan di Indonesia akhir-akhir ini, tidak bisa dinafikan bahwa terdapat sebagian orang yang masih memandang Islam sebagai ancaman peradaban, diakibatkan oleh ulah sekelompok kecil umat Islam yang memahami agama secara dangkal dan literal yang tidak bisa mengikuti

perkembangan zaman. Mereka ini merasa sangat terdesak oleh gelombang modernitas dan globalisasi. Pemahaman agama yang sempit mengakibatkan pada kejumudan dalam berpikir dan kadang-kadang mengarah kepada radikalisme dan intoleransi. Pemahaman akan makna kemajemukan dan pluralisme dalam beragama menjadi hal yang sangat urgen untuk dipelajari oleh semua agama demi mewujudkan saling menghargai dan membangun toleransi antar umat beragama. Terjadinya konflik antar umat beragama disebabkan oleh tidak adanya saling komunikasi yang mengarah kepada kesepahaman bersama (*A Common Word*) antar umat beragama khususnya di Indonesia. Sehingga dialog antar umat beragama menjadi suatu keniscayaan yang harus dilakukan. Mengutip pernyataan Mashood Baderin "A dialogical approach demands a

culture of tolerance and persuasion and the abandonment of a culture of parochialism, violence and rivalry. It requires capacity to listen, respect, accommodate and exchange. The importance of a dialogue approach for achieving ' a Common Understanding".¹⁴

Dibutuhkan suatu pendekatan dialogis yang mengarah pada budaya saling toleransi; membuang kebencian dan permusuhan, kemampuan untuk saling mendengar, sikap akomodatif, dan saling tukar informasi untuk mencapai kesepahaman bersama. Pendekatan yang ditawarkan oleh Baderin cukup memberikan solusi bagi konflik antar umat beragama yang diakibatkan oleh kesenjangan pemahaman dalam memahami ajaran agama masing-masing.

Menurut Waleed el-Ansary Dialog merupakan sebuah

komunikasi timbal balik yang selalu diiringi dengan perasaan dan sikap keterbukaan para pembicara untuk saling mendengarkan, memahami, berjalan bersama, saling membuka diri untuk kehadiran Tuhan diantara sesama. Dialog yang tidak semata-mata berbicara atau berdiskusi, tetapi dialog yang ditafsirkan sebagai hubungan antar pemeluk agama dalam semua lini kehidupan, agama, kerjasama dalam proyek sosial dan pertukaran pengalaman beragama.¹⁵

b. Permasalahan yang bersifat Penafsiran (*interpreting*)

Persoalan yang bersifat penafsiran dalam konteks kehidupan antar umat beragama biasanya terletak pada penafsiran teks-teks, baik itu kitab suci maupun buku-buku yang ditulis oleh tokoh agamanya. Bisa teks itu berupa

¹⁴ Mashood A. Baderin, *International Human Right and Islamic law* (New York: Oxford University Press, 2003), 5.

¹⁵ Lihat El-Ansary dan David K. Linnan (Ed.), *"Narrative Introduction" dalam Muslim and Christian Understanding: Theory and Application of "A Common Word"* (New York: Palgrave Macmillan, 2010), 1.

tulisan, gambar, maupun tutur lisan. Agama Islam misalnya kitab sucinya atau buku-buku yang ditulis oleh para tokoh agamanya teksnya berupa tulisan. Ada beberapa metode penafsiran yang cocok dalam menjelaskan kehidupan antar umat beraagama dengan pendekatan Hermeneutik .

Hermeneutik adalah perbincangan tentang persoalan pemahaman atau penafsiran manusia terhadap realitas yang ada disekelilingnya, termasuk di dalamnya agama dan kehidupan sosial-budaya-ekonomi-politik-hukum yang mengitarinya (*al-nas wa ma haulahu*) baik yang menyangkut tentang teori, metode, pendekatan, filosofi, aliran-aliran, tokoh, maupun tema, isu-isu aktual dan begitu seterusnya.¹⁶

¹⁶ Irsyadunnas, *Hermeneutika Femenisme: Dalam Pemikiran Tokoh Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 4.

Dalam hermeneutika keagamaan dan studi keislaman kontemporer dikenal analisis hermeneutis dengan menggunakan skema segi tiga : *Text, Author* dan *Reader*. wilayah *Text* (teks) adalah sangat penting bagi umat beragama. Lebih-lebih teks kitab suci. Sebegitu pentingnya, sehingga tanpa disadari kadang-kadang ia meninggalkan dimensi rasionalitas-kritis dan masuk dibawah tekanan dan tuntutan dimensi psikologis manusia. Jika telah kehilangan dimensi rasionalitas-kritisnya, maka sitiran dan kutipan kitab suci bisa berubah menjadi sangat peka dan *over-sensitive*, dan cenderung emosional bahkan tak menutup kemungkinan dapat berubah menjadi kekerasan (*violence*) psikis maupun fisik.

Meminjam bahasa filsafat ilmu, wilayah kitab suci itu adalah wilayah *nonfalsifiable* (tak

dapat difalsifikasi/tak dapat disalahkan). Teks kitab suci adalah *taken for granted* bagi semua umat beragama. Sedangkan yang menjadi kajian penting dan menarik dalam hermeneutika kontemporer adalah wilayah kajian teoritik sekaligus praxis yang berada dalam dua wilayah cakupan dua kaki segitiga, yaitu wilayah *Author* dan *Reader*. Kedua wilayah inilah yang terkait dengan masalah kemanusiaan yang sesungguhnya. Inilah wilayah *historisitas kemanusiaan* yang *debatable, qabilun li al-niqasy wa al-taghyir* (bisa didiskusikan, diperbincangkan, didialogkan, disesuaikan, diadaptasikan, dan diubah dimana perlu) karena dinamika masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, globalisasi ekonomi dan media, hubungan internasional yang semuanya punya dampak yang cukup

signifikan pada sendi-sendi kehidupan manusia.¹⁷

Abdullah Saeed menyatakan bahwa perlu adanya pendekatan baru yang disebut dengan *contextualist approach* yang memperhatikan socio-historical context di mana Al-Qur'an diturunkan pada masa awal Islam dan kebutuhan masyarakat Muslim di era abad 21 dan masa yang akan datang. Pendekatan ini diharapkan dapat melepaskan keterbelengguan umat Islam dari legalistic-literalistic approach yang mendominasi interpretasi tafsir dan fiqh sejak periode pembentukan hukum Islam sampai era modern saat ini.¹⁸

Dengan pendekatan hermenetik, teks-teks keagamaan dapat ditafsirkan

¹⁷ M. Amin Abdullah, *Hermeneutik dalam Islam dalam Budaya Popular*, (Tulisan dikutip tgl. 3 juni 2010)

¹⁸ Abdullah Saeed, *Interpreting Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (London dan New York: Routledge Publishing, 2006), 9.

melalui konteks atau sesuai dengan kondisi yang lagi berkembang dengan mempertimbangkan kemaslahatan. Begitu juga halnya dalam menafsirkan pola interaksi kehidupan umat beragama selalu dipandang dalam perspektif yang positif. Dalam perspektif islam, teks-teks al-Quran maupun al-Hadist banyak mengandung nilai-nilai toleransi dan saling menghargai antar umat beragama.

c. Permasalahan yang bersifat Penjelasan (*Explaining*)

Penjelasan (*explaining*) ini adalah implikasi dari pokok pemahaman dan penafsiran. Bagaimana seseorang memahami sebuah problematika (berikut solusinya), melalui interpretasi yang kontekstual. Pada tahap pemahaman dan interpretasi disini masih belum menemukan sebuah keluaran yang sempurna sebelum ada upaya penjelasan secara komprehensif dan

representative, yang dapat dimengerti oleh yang lain.

Dalam konteks hubungan antar umat beragama, penjelasan dan pengkajian kerukunan hidup umat beragama dapat dilakukan pada dua level kajian, yaitu pengkajian pada level doktrin (ajaran) agama dan pada level sosiologis-historis atau empirik realitas kehidupan beragama secara nyata.¹⁹

Pertama, pengkajian kerukunan umat beragama dapat dilakukan pada level doktrin dalam kitab-kitab suci agama-agama yaitu mengkaji ajaran-ajaran, ayat-ayat, pesan-pesan suci yang berasal atau terdapat dalam kitab suci masing-masing agama yang mengandung atau berisi ajaran-ajaran tentang kerukunan, baik didalam (intern) agamanya maupun

¹⁹ Sudjangi, *Bingkai Sosio Kultural Kehidupan Antar Umat Beragama di Indonesia*, (Jakarta, Puslitbang, Depag RI, 1998), 3.

dengan agama-agama lain yang berbeda. Tentu saja diantara kitab-kitab suci dari agama-agama yang berbeda itu mengandung perbedaan-perbedaan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Perbedaan-perbedaan tersebut terutama dalam aspek yang bersifat prinsip (fundamental) seperti aqidah, ibadah (ritual). Perbedaan dibidang-bidang tersebut tak dapat dipersatukan dan memang tak perlu dicari titik temunya. Sebab upaya mempersatukan ajaran agama yang pokok tersebut hanya sia-sia belaka, kecuali jika yang dikehendaki " sebuah kerukunan " itu adalah sinkretisme, karena sinkretisme ditolak oleh semua agama-agama yang ada di Indonesia. Dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, suatu tujuan yang dikehendaki adalah kerukunan umat beragama penggalan atau pengkajian

pada level doktrin atau kitab suci dari agama-agama ini sangat diperlukan, dan hasilnya perlu disebarluaskan kepada masyarakat. Hal ini seperti yang pernah dilakukan oleh tokoh-tokoh lintas agama : MUI (Majelis Ulama' Indonesia), PGI, KWI, PHDI dan WALUBI dan lain-lain.

Kedua, pengkajian kerukunan umat beragama pada tataran historis-sosiologis atau empirik. Hal ini penting dilakukan, realitas umat beragama di masyarakat bawah (grass root) menunjukkan bahwa dalam masyarakat-masyarakat lokal di Indonesia, khususnya pada masyarakat yang heterogen dari segi suku dan agama, ternyata mereka telah menciptakan tradisi-tradisi yang menunjang demi terwujudnya kerukunan hidup antar umat beragama maupun intern umat bergama.

Allah berfirman: Q.S. Al-Hujarat [49]: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ - ١٣

Artinya:

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ayat tersebut di atas sering disebut sebagai ayat membangun silaturahmi atau persaudaraan guna merajut kebersamaan sekaligus memperkokoh persatuan dan kesatuan. Persaudaraan akan menjadi indah apabila terbangun secara harmonis dengan media saling mengenal, saling berinteraksi, membangun dialog agar menjadi manusia yang pantas mendapatkan martabat dan kemuliaan di sisi

Tuhan Yang Maha Esa karena kualitas spiritualnya. Secara theologis, mengingkari keragaman sama saja mengingkari sunnatulloh atau ketentuan Tuhan, karena memang dari azalnya Allah SWT telah menciptakan manusia dalam berbagai perspektif-Nya; warna kulit, bahasa, dan suku golongannya. Keberagaman menjadi dasar berfikir secara kolektif untuk memahami dan mengembangkan wacana serta sikap pluralis serta mengedepankan keterbukaan.

SIMPULAN

Agama sebagai pembawa damai sudah semestinya dapat hidup berdamai dengan agama-agama yang berbeda. Oleh karena itu, sebagai orang yang beragama, tidaklah pantas berbicara tentang kedamaian tanpa berusaha untuk hidup damai dengan pemeluk agama lain. Usaha untuk membangun jembatan komunikasi antar agama harusnya tak mengenal putus asa, walau beribu tantangan berat melintang didepannya. Oleh karena itu, untuk memberikan jalan tengah perlu komitmen semua elemen masyarakat untuk mewujudkan kerukunan hidup umat beragama, yaitu berupa kajian-kajian yang sangat mendalam dan membutuhkan kesabaran tentunya. Pengkajian kerukunan hidup umat beragama paling tidak dapat dilakukan pada dua level kajian, yaitu pengkajian pada level doktrin (ajaran) agama dan pada level sosiologis-historis atau empirik

realitas kehidupan beragama secara nyata.

Pendidikan memiliki peran strategis untuk membangun serta mengembalikan cara berpikir dan sikap peserta didik ke dalam tataran yang mengerti kemajemukan bermasyarakat dalam beragama dan berbudaya. Dalam konteks implementasi, pendidikan yang diselenggarakan haruslah pendidikan yang empati dan simpati terhadap problem kemanusiaan seperti penindasan, kemiskinan, pembantaian, dan sebagainya. Pendidikan agama yang berlangsung bukan sekadar penanaman wacana melalui proses indoktrinasi otak, tetapi melatih terampil beragama dan kesiapan menghadapi masalah konkret dalam masyarakat yang mejemuk yang sangat menghargai perbedaan.

Saling pengertian, menghargai, menghormati, rendah hati, menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas dan kemanusiaan, mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi

dan golongan, cinta, sensitif dalam memandang nilai, senantiasa berusaha menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan, dan lain-lain yang semakna merupakan prinsip-prinsip hidup dalam kemajemukan yang akan melahirkan model kehidupan yang penuh toleransi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulaziz Sachedina, *The Islamic Roots of Democratic Pluralism*, Oxford, New York: Oxford University Press, 2001
- Abdullah Saeed, *Interpreting Qur'an: Towards a Contemporary Approach*, London dan New York: Routledge Publishing, 2006
- Alef Theria Wasim, *Kumpulan Materi Kuliah Psikologi Lintas Agama dan Budaya 2013-2014*
- Ali Maksum dan Luluk Yunan Ruhendi, *Paradigma Pendidikan Universal*, Yogyakarta: IRCICOD, 2004
- Alo Lilirweri, *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, Yogyakarta: LKiS, 2005
- Griffiths, J.A. *Children's understanding of, and attitudes toward, ethnic in-groups and out-groups.*, Griffith University, Australia, 2006
- Irsyadunnas, *Hermeneutika Femenisme: Dalam Pemikiran Tokoh Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014
- Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naispospos (eds.), *Negara Menyangkal Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2010*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2011
- Kingsley Davis, *Human Society*, New York: MacMillan Co, 1948
- Mashood A. Baderin, *International Human Right and Islamic law* New York: Oxford University Press, 2003
- M. Amin Abdullah, *Hermetik dalam Islam dalam Budaya Popular*, Tulisan dikutip tgl. 3 juni 2010
- Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, New Delhi: Kitab Bhavan, 1985
- Office of the High Commissioner for Human Right, *Minority Rights: International Standards and Guidance for Implementation*, New York, 2010
- Prasodjo, B Imam "Inikah Negeri Darurat Kompleks?", dalam *Jurnal Aksi Sosial*, Tahun I Edisi Oktober-Desember 2004
- Said Agiel Sirajd, *Islam Kebangsaan: Fiqih Demokratik Kaum Santri*, Jakarta, Pustaka Ciganjur, 1999

- Santoso Thomas, *Teori-Teori Kekerasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
- Sudjangi, *Bingkai Sosio Kultural Kehidupan Antar Umat Beragama di Indonesia*, Jakarta, Puslitbang, Depag RI, 1998
- Talcott Parsons, *Essays in Sociological Theory*, Glencoe: The Free Press, 1985
- Thomas F. O'dea, *Sosiologi Agama: Suatu Pengenalan Awal*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada kerjasama dengan Yayasan Solidaritas Gajah Mada, 1995
- Usman Pelly, *Kualitas Bermasyarakat: Sebuah Studi Peranan Etnis dan Pendidikan dalam Keresasian Sosial*, Medan: Proyek Kerjasama Kantor Meneg KLH-IKIP Medan, 1988